

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI**
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 18 Juni 2012
Waktu	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: - Pembahasan Penyempurnaan Alokasi Anggaran RKA K/L TA. 2013 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI. - Evaluasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2011 dan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012.
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: 29 dari jumlah 50 Anggota Komisi II DPR RI
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 dibuka pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. Drs. Taufiq Effendi, MBA yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada hari ini yakni terkait dengan Pembahasan Penyempurnaan Alokasi Anggaran RKA K/L TA. 2013 dan Evaluasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2011 serta Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada Komisi II DPR RI terkait dengan agenda acara beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah TA. 2013, Kementerian Dalam negeri direncanakan mendapat alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2013 sebesar Rp.15.005.734.900.000,-.
 - b. Adapun distribusi rencana alokasi anggaran Kemendagri Tahun 2013 terdistribusi dalam 13 program yakni :
 - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemendagri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 267.683.900.000,-

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendagri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 804.937.600.000,-
 - 3) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 263.782.200.000,-
 - 4) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 576.014.700.000,-
 - 5) Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 230.103.200.000,-
 - 6) Program Bina Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 617.112.600.000,-
 - 7) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.950.455.900.000,-
 - 8) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 251.775.000.000,-
 - 9) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.451.500.000,-
 - 10) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.567.600.000,-
 - 11) Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.347.500.000,-
 - 12) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 290.637.700.000,-
 - 13) Program Pendidikan Kepamongprajaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 529.865.500.000,-
- c. Kemendagri mengharapkan dukungan Badan Anggaran Komisi II DPR RI terkait dengan usulan tambahan Kemendagri Tahun 2013 sebesar Rp 512,3 Milyar yang diperuntukkan bagi:
- 1) Pemenuhan kekurangan anggaran penyediaan jaringan komunikasi data untuk keberlanjutan program Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penerapan E-KTP sebesar Rp.225,83 Milyar;
 - 2) Penyediaan peralatan E-KTP bagi 460 kecamatan pemekaran sebesar Rp.75,00 Milyar;
 - 3) Penyediaan blanko E-KTP untuk mengakomodasi kebutuhan E-KTP bagi penduduk yang baru berumur 17 tahun, pindah-datang antar daerah, datang dari luar negeri, perubahan status, perkawinan di bawah umur 17 tahun. Kebutuhan anggaran untuk memenuhi blanko E-KTP dimaksud (perkiraan kebutuhan Tahun 2013 sebanyak 8,6 juta keping E-KTP), adalah sebesar Rp.137,00 Milyar; dan
 - 4) Pemenuhan perangkat *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) *database* E-KTP sebesar Rp.75,00 Milyar.
- d. Disamping itu, Kemendagri juga mengharapkan dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk dapat mengakomodir kebutuhan tambahan anggaran Tahun 2012, yaitu:
- 1) Penyelesaian sisa pekerjaan Tahun 2011 untuk penyediaan blanko e-KTP berbasis chip, pencetakan dan distribusi e-KTP di 197 Kabupaten/Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.045,50 Milyar.

2) Tambahan BLM untuk 1.661 kecamatan pada kegiatan PNPM-MP, sebesar Rp.1.293,00 Milyar.

Dan bila kebutuhan tambahan anggaran dimaksud tidak terakomodir akan menghambat pencapaian target kinerja Kementerian Dalam Negeri serta target prioritas nasional secara keseluruhan.

4. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan kepada Komisi II DPR RI terkait dengan agenda acara beberapa hal sebagai berikut:

a. Pagu Indikatif BNPP TA.2013 sebesar Rp. 273.800.000.000,- yang terdiri dari Pagu Belanja Mengikat sebesar Rp 14.135.200.000,- dan Pagu Belanja Tidak Mengikat sebesar Rp 259.664.800.000,-.

b. Adapun pagu indikatif tersebut untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP untuk mengakomodasi kegiatan dilingkup Sekretariat dengan 2 kegiatan yakni:

a) Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum dengan anggaran Rp 105.000.000.000,-.

b) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 33.800.000.000,-.

2) Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk mengakomodasi kegiatan di lingkup kedeputan dan pengalokasian anggaran ke daerah melalui mekanisme tugas pembantuan dengan 9 kegiatan yakni:

a) Pengelolaan Batas Wilayah Darat dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,-

b) Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,-

c) Pengelolaan Lintas Batas Negara dengan anggaran sebesar Rp 25.600.000.000,-

d) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,-

e) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 9.800.000.000,-

f) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,-

g) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 24.600.000.000,-

h) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,-

i) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,-

c. Program pengelolaan perbatasan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek yaitu

1) Batas Wilayah Negara

2) Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum

3) Ekonomi Kawasan

4) Pelayanan Sosial Dasar

5) Kelembagaan

- d. Terkait Rencana Aksi Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012, telah diterbitkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2012 yang menetapkan alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan antar negara sebesar Rp 3.858.379.590.000,-
- e. BNPP telah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang telah dibahas lintas kementerian, yang pada intinya mengatur pelaksanaan jenis-jenis kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam Pasal 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.
- f. Terhadap jenis-jenis kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui tugas pembantuan, BNPP mengusulkan pembiayaannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan untuk itu BNPP telah menyusun dokumen kriteria penetapan lokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik "kriteria teknis" maupun "kriteria khusus", serta rencana dan perkiraan kebutuhan anggaran DAK sampai dengan Tahun 2016.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 15.005.734.900.000,- Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu yang diusulkan tersebut, namun untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun kembali alokasi anggaran dan rincian rencana kerja dengan memperhatikan seluruh usulan dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI antara lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Antisipasi akan terselesainya undang-undang
 - Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pendidikan politik di daerah.
 - Pembinaan dan pengembangan kawasan dan pertanahan
 - Pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan
 - Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - Pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
 - Penyelenggaraan otonomi khusus
2. Terhadap pagu indikatif Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 273.800.000.000,- Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu yang diusulkan tersebut, namun untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menyusun kembali alokasi anggaran dan rincian rencana kerja dengan memperhatikan seluruh usulan dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dikawasan perbatasan, serta penyelesaian disain besar yang berbasis lokasi prioritas (kecamatan).

3. Terhadap program PNPM Mandiri Pedesaan dan Program e-KTP termasuk usulan tambahan anggaran Tahun 2013 sebesar Rp 512,83 Milyar, Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati untuk dilakukan Rapat Kerja dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran program tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.30 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126